AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 1, Januari 2026

Metode Netnografi Menguliti Narasi Banjir Sumatera: Alam Dikambinghitamkan, Korporasi Disalahkan, Pemerintah ke Mana?

Thamira Ashilla[1], Soca Berlianto[2], Eka Permana[3], Ovalia Rukmana[4]
Universitas Bakrie, Indonesia
socaberlian@gmail.com[2], permana.eka@gmail.com[3], ovalia.rukmana@bakrie.ac.id[4]
E-mail Korespondensi : thamira.ashilla@gmail.com[1]

Submitted: 18th Sept 2025 | **Edited**: 26th Dec 2025 | **Issued**: 01st January 2026

Cited on: Ashilla, T., Berlianto, S., Permana, E., & Rukmana, O. (2026). Metode Netnografi Menguliti Narasi Banjir Sumatera: Alam Dikambinghitamkan, Korporasi Disalahkan, Pemerintah ke Mana?. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *6*(1), 569-581.

ABSTRACT

Recurrent flooding in Sumatra has triggered intense debate on social media regarding its underlying causes and the attribution of responsibility. While previous disaster studies in Indonesia have largely emphasized technical and physical dimensions, limited attention has been given to how public discourse frames flood causality in digital spaces. This study aims to examine how the causes of flooding in Sumatra are constructed in social media discourse and to identify which actors are most prominently associated with responsibility. Employing a qualitative multi-platform netnographic approach, this research analyzes user-generated comments from Facebook, YouTube, and TikTok collected during the first month following major flood events. Data were examined using NVivo 15 through word frequency analysis, word cloud visualization, and hierarchical mapping to identify dominant themes and framing patterns. The findings reveal that public discourse predominantly frames flooding as a natural and moral phenomenon, emphasizing environmental factors and religious interpretations. Although references to government accountability and corporate activities such as deforestation and extractive industries are present, they appear less frequently and in fragmented forms. These results suggest that social media discourse tends to depoliticize flood risk by foregrounding natural explanations, while structural and governance-related factors remain marginal. This study contributes to disaster communication scholarship by highlighting the discursive production of disaster risk in digitally mediated public arenas.

Keywords: Flooding, Netnography, Disaster Framing, Social Media, Risk Governance

PENDAHULUAN

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia melaporkan bahwa pada tahun 2025 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 229.428.417 jiwa dari total populasi sekitar 284.438.900 penduduk, dengan tingkat penetrasi sebesar 80,66 persen (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII], 2025). Data ini menunjukkan bahwa media digital, khususnya media sosial, telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Seiring dengan peningkatan tersebut, terjadi pergeseran dominasi platform media sosial, dari yang berbasis teks menuju platform visual dan audiovisual

seperti YouTube, Facebook, dan TikTok. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi pola komunikasi sehari-hari, tetapi juga membentuk cara publik merespons, menafsirkan, dan memperdebatkan peristiwa kolektif, termasuk bencana alam dan bencana perkotaan.

Dalam konteks kebencanaan, media sosial berfungsi sebagai ruang publik digital tempat emosi, opini, dan narasi kolektif diproduksi serta disebarluaskan secara cepat. Beragam konten, mulai dari siaran langsung kondisi darurat, dokumentasi kerusakan, kesaksian korban, hingga penggalangan dana dan peta evakuasi berbasis partisipasi publik, membentuk ekosistem data yang tumbuh secara organik (Palen & Anderson, 2016). Di Indonesia yang rawan bencana, narasi warga di media sosial kerap berperan sebagai situs memori digital yang terbuka dan partisipatif, melampaui arsip konvensional yang umumnya dikontrol negara (Lukman, 2020; Putra, 2023; Husaini, 2024).

Namun demikian, keterbukaan dan kecepatan arus informasi di media sosial juga menghadirkan tantangan. Informasi yang bersifat fragmentaris, emosional, dan viral berpotensi membentuk persepsi keliru, memperkuat polarisasi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi (Yanti & Yusnaini, 2018). Puspita (2025) menunjukkan bahwa analisis media sosial dapat dimanfaatkan untuk merancang strategi dokumentasi krisis yang lebih representatif dan partisipatif. Dalam perspektif ini, bencana tidak lagi dipahami semata sebagai peristiwa alam, melainkan sebagai hasil pertemuan antara ancaman alam dan kerentanan sosial, politik, serta ekonomi ketika kapasitas pengelolaan risiko tidak memadai.

Pemaknaan terhadap penyebab bencana bersifat plural dan kerap menjadi arena perdebatan di ruang digital. Mahfud MD melalui kanal YouTube Mahfud MD Official menekankan bahwa banjir di Sumatera tidak hanya dipicu oleh faktor alam, tetapi juga oleh kerusakan hutan serta kebijakan negara yang lalai. Pandangan tersebut mencerminkan setidaknya tiga narasi utama dalam diskursus publik, yakni bencana sebagai fenomena alam, sebagai dampak aktivitas manusia dan korporasi (Priyanti et al., 2019), serta sebagai konsekuensi dari kegagalan tata kelola pemerintah (Hawing, 2021). Ketiga narasi ini berinteraksi dan membentuk proses atribusi tanggung jawab di ruang publik digital

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam pembingkaian krisis dan bencana, tetapi kajian kebencanaan di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan teknis dan fisik, sementara dimensi

diskursif dan kultural relatif kurang mendapat perhatian (Arwansyah et al., 2025). Padahal, pemahaman mengenai bagaimana publik membingkai penyebab bencana memiliki implikasi penting bagi komunikasi risiko, kepercayaan terhadap institusi, serta perumusan kebijakan mitigasi yang lebih partisipatif (Li, 2014; Khankeh et al., 2023).

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana penyebab banjir di Sumatera direpresentasikan dalam diskursus publik di media sosial? dan (2) aktor apa saja yang paling sering dihadirkan dalam atribusi tanggung jawab atas terjadinya banjir tersebut? Dengan menggunakan kerangka Social-Mediated Crisis Communication dan pendekatan netnografi multi-platform, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola framing penyebab banjir di Sumatera dalam diskursus media sosial serta mengidentifikasi dinamika atribusi tanggung jawab antara faktor alam, praktik korporasi, dan tata kelola pemerintah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian kebencanaan dari perspektif sosial-holistik serta memberikan rujukan praktis bagi lembaga kebencanaan, pemerintah daerah, dan pengelola platform digital dalam penguatan komunikasi risiko dan mitigasi bencana.

LANDASAN TEORI

Netnografi sebagai Pendekatan Analisis Budaya Digital

Netnografi diperkenalkan oleh Kozinets sebagai adaptasi metode etnografi untuk meneliti praktik sosial, interaksi, dan produksi makna dalam komunitas daring (Kozinets, 2016). Dalam konteks media sosial, netnografi memungkinkan peneliti mengamati bagaimana pengguna membangun narasi, menegosiasikan makna, serta mengekspresikan nilai dan keyakinan secara natural tanpa intervensi langsung. Pendekatan ini relevan untuk penelitian kebencanaan karena bencana tidak hanya diproduksi secara material, tetapi juga secara simbolik melalui bahasa, emosi, dan narasi kolektif yang berkembang di ruang digital (Palen & Anderson, 2016).

Secara operasional, netnografi dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka untuk menentukan unit analisis (konten dan komentar pengguna), strategi pengambilan data lintas platform, serta prinsip etis dalam pengamatan daring. Observasi non-partisipatif memungkinkan peneliti menangkap respons spontan publik terhadap peristiwa banjir di Sumatera, termasuk ekspresi moral, politis, dan emosional yang

muncul dalam interaksi antarwarganet (Wallace et al., 2018). Dengan demikian, netnografi berfungsi sebagai fondasi metodologis untuk memahami konteks sosial dan budaya tempat framing bencana diproduksi dan disirkulasikan.

Framing Theory dalam Diskursus Bencana

Framing theory memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi melalui proses seleksi, penekanan, dan pengorganisasian informasi (Goffman, 1974; Entman, 1993). Dalam diskursus kebencanaan, framing menentukan bagaimana suatu peristiwa dipahami, siapa yang dianggap bertanggung jawab, dan solusi apa yang dianggap relevan atau mungkin. Entman (1993) menekankan bahwa framing mencakup empat fungsi utama, yaitu mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab, membuat penilaian moral, dan menyarankan penanganan.

Dalam penelitian ini, framing theory digunakan secara analitis untuk mengidentifikasi pola atribusi penyebab banjir dalam diskursus media sosial. Bahasa, istilah dominan, dan struktur narasi dalam komentar pengguna dianalisis untuk melihat bagaimana banjir dibingkai sebagai fenomena alam, peristiwa moral-religius, akibat praktik korporasi, atau kegagalan tata kelola pemerintah. Dengan demikian, framing tidak dipahami sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai pola linguistik dan tematik yang dapat ditelusuri secara empiris melalui data teks.

Integrasi Netnografi dan Framing dalam Analisis Data

Integrasi netnografi dan framing theory memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap produksi makna bencana di ruang digital. Netnografi menyediakan konteks sosial, temporal, dan platform-spesifik tempat narasi berkembang, sementara framing theory digunakan untuk membaca struktur makna dan atribusi tanggung jawab yang terkandung dalam interaksi tersebut (Srivastav & Rai, 2022). Dalam praktik analisis, data yang dikumpulkan melalui netnografi dianalisis menggunakan thematic analysis untuk mengidentifikasi unit makna, yang selanjutnya dipetakan ke dalam kategori framing berdasarkan fungsi framing Entman.

Penggunaan perangkat lunak NVivo 15 mendukung proses ini melalui word frequency analysis, hierarchy chart, dan pengelompokan kode tematik. Istilah yang sering muncul tidak hanya diperlakukan sebagai data kuantitatif, tetapi ditafsirkan sebagai indikator saliensi framing dalam diskursus publik. Dengan cara ini, framing alam, religius,

korporasi, dan negara dapat diidentifikasi sebagai hasil interaksi simbolik antar pengguna media sosial, bukan sebagai kategori yang ditentukan sebelumnya.

Pendekatan ini sejalan dengan perspektif social production of disaster risk yang memandang bencana sebagai hasil interaksi antara hazard alam dan proses sosial-politik yang membentuk kerentanan (Priyanti et al., 2019). Melalui integrasi netnografi dan framing, penelitian ini menempatkan media sosial sebagai arena penting dalam pembentukan persepsi risiko, legitimasi kebijakan, dan distribusi tanggung jawab dalam konteks kebencanaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode netnografi multi-platform untuk menganalisis bagaimana penyebab banjir di Sumatera dikonstruksikan dalam diskursus publik di media sosial. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menangkap praktik komunikasi, produksi makna, serta dinamika atribusi tanggung jawab yang berkembang secara alami di ruang digital, khususnya pada konteks kebencanaan yang bersifat krisis dan emosional (Kozinets, 2020; Srivastav & Rai, 2022).

Pengumpulan data dilakukan pada tiga platform media sosial utama, yaitu TikTok, Facebook, dan YouTube, yang dipilih karena karakteristik audiensnya yang luas serta kemampuannya dalam memproduksi dan menyebarkan narasi visual, audiovisual, dan komentar publik secara masif. Unit analisis penelitian ini meliputi konten video yang secara eksplisit membahas peristiwa banjir di wilayah Sumatera beserta seluruh komentar dan balasan pengguna yang menyertainya. Data dikumpulkan dalam rentang waktu H+1 hingga H+30 setelah kejadian banjir untuk menangkap respons awal publik sekaligus dinamika perkembangan narasi dalam fase pascakejadian, sebagaimana disarankan dalam studi komunikasi krisis digital (Palen et al., 2020; Eriksson & Olsson, 2021)

Proses sampling dilakukan secara bertahap. Tahap pertama menggunakan purposive sampling dengan kata kunci seperti banjir Sumatera, banjir bandang, hutan, tambang, dan pemerintah untuk mengidentifikasi konten relevan. Tahap kedua menerapkan theoretical sampling dengan memilih komentar yang mengandung konflik naratif, pernyataan atribusi penyebab, serta rujukan terhadap aktor tertentu (alam, korporasi, atau negara). Kriteria inklusi data mencakup komentar yang (1) relevan secara substantif dengan penyebab banjir, (2) ditulis oleh pengguna publik, dan (3) dapat dibaca

secara utuh tanpa moderasi tertutup. Komentar yang bersifat spam, tidak berkaitan dengan topik, atau hanya berisi emoji tanpa narasi dikeluarkan dari analisis. Secara keseluruhan, data yang dianalisis mencakup ratusan komentar dari sembilan konten utama lintas platform dengan jumlah penonton yang bervariasi dari puluhan ribu hingga puluhan juta, sehingga merepresentasikan tingkat visibilitas dan jangkauan diskursus yang berbeda.

Sebagaimana tercermin dalam sampel data, konten TikTok menunjukkan tingkat keterpaparan audiens paling tinggi, dengan jumlah penonton mencapai puluhan juta, sementara Facebook dan YouTube menghadirkan diskursus yang lebih argumentatif melalui kolom komentar yang relatif panjang. Variasi ini memberikan konteks penting bagi analisis lintas platform, karena arsitektur media dan budaya partisipasi masing-masing platform memengaruhi bentuk dan intensitas framing yang berkembang (Bucher & Helmond, 2018; Kligler-Vilenchik et al., 2020).

Seluruh data diekstraksi dan disimpan dalam format teks, kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 15. Analisis data dilakukan melalui thematic analysis dengan tahapan familiarisasi, open coding, dan axial coding sebagaimana dikemukakan oleh Braun dan Clarke (2021). Pada tahap open coding, peneliti mengidentifikasi unit makna yang merujuk pada penyebab banjir, ekspresi moral, serta atribusi tanggung jawab. Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan secara konseptual pada tahap axial coding untuk membentuk kategori framing utama, seperti framing alamiah, religius, korporasi, dan kegagalan tata kelola pemerintah.

Untuk memperkuat pembacaan pola diskursif, analisis juga memanfaatkan word frequency analysis, word cloud, dan hierarchy chart. Frekuensi kemunculan istilah tidak diperlakukan sebagai ukuran kuantitatif semata, melainkan sebagai indikator saliensi narasi dalam diskursus publik. Interpretasi dilakukan dengan mengaitkan pola linguistik tersebut pada konteks sosial dan politik yang lebih luas, khususnya dalam perspektif produksi sosial risiko bencana dan atribusi kesalahan (Douglas, 2021; Tierney, 2019).

Seluruh proses penelitian mematuhi prinsip etika penelitian digital dengan menjaga anonimitas pengguna, tidak mengutip identitas akun, serta membatasi analisis pada konten yang tersedia secara publik. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian tidak melanggar privasi pengguna sekaligus tetap mempertahankan integritas akademik dalam studi kebencanaan berbasis media sosial (Franzke et al., 2020).

HASIL PENELITIAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis empiris dari data netnografi multi-platform terkait diskursus publik mengenai penyebab banjir di Sumatera. Penyajian difokuskan pada pemaparan temuan utama tanpa penafsiran teoretis. Data dianalisis menggunakan NVivo 15 melalui word frequency analysis, word cloud, dan hierarchy chart (sunburst) untuk mengidentifikasi pola kemunculan istilah serta struktur tema yang berkembang dalam interaksi warganet.

Tabel 1. Hasil Word Frequency Diskursus Publik Banjir di Sumatera

No	Word	Length	Count	Weighted Percentage (%)
1	Hutan	5	510	2,32
2	Bencana	7	328	1,49
3	Alam	4	309	1,40
4	Air	3	249	1,13
5	Allah	5	234	1,06
6	Hujan	5	193	0,88
7	Banjir	6	191	0,87
8	Kayu	4	151	0,69
9	Pemerintah	10	148	0,67
10	Pohon	5	134	0,61
11	Pejabat	7	131	0,60
12	Sawit	5	124	0,56
13	Negara	6	76	0,35
14	Longsor	7	74	0,34
15	Tambang	7	74	0,34
16	Keserakahan	11	67	0,30
17	Prabowo	7	65	0,30
18	Penebangan	10	62	0,28
19	Sumatera	8	62	0,28
20	Bandang	7	53	0,24

Sumber: Hasil Analisis NVivo 15, 2025

Hasil analisis word frequency menunjukkan bahwa diskursus publik mengenai banjir di Sumatera di media sosial didominasi oleh istilah-istilah yang berkaitan dengan faktor ekologis dan alam. Kata hutan muncul sebagai istilah dengan frekuensi tertinggi, diikuti oleh bencana, alam, air, hujan, dan banjir. Dominasi kosakata tersebut menunjukkan bahwa perbincangan warganet secara umum menempatkan banjir dalam kerangka lingkungan dan proses alamiah. Tingginya kemunculan istilah hutan, pohon, kayu, dan penebangan juga mengindikasikan bahwa isu tutupan lahan dan kondisi ekosistem menjadi referensi penting dalam menjelaskan penyebab bencana, meskipun belum selalu dihubungkan secara eksplisit dengan kebijakan atau aktor tertentu.

 E-ISSN 2774-8863

Selain narasi ekologis, data juga memperlihatkan kuatnya dimensi religius dalam diskursus publik. Kemunculan kata Allah dengan persentase yang relatif tinggi menunjukkan bahwa sebagian warganet memaknai banjir sebagai peristiwa yang berkaitan dengan nilai moral, spiritual, atau kehendak transenden. Framing semacam ini cenderung hadir berdampingan dengan penjelasan alamiah, sehingga memperkuat pemaknaan banjir sebagai fenomena yang berada di luar kendali manusia. Dalam konteks ini, narasi religius berfungsi sebagai cara publik memberi makna terhadap penderitaan dan ketidakpastian, tanpa secara langsung menuntut akuntabilitas institusional.

Sementara itu, istilah yang merujuk pada aktor negara dan praktik ekonomi, seperti pemerintah, pejabat, negara, sawit, dan tambang, muncul dengan frekuensi yang lebih rendah dan tersebar. Pola ini menunjukkan bahwa kritik terhadap tata kelola dan aktivitas korporasi memang hadir dalam diskursus, namun tidak menjadi bingkai utama percakapan. Kemunculan istilah seperti keserakahan dan nama tokoh politik tertentu mengindikasikan adanya upaya personalisasi dan politisasi penyebab bencana, meskipun masih bersifat sporadis. Secara keseluruhan, interpretasi tabel ini memperlihatkan bahwa diskursus publik tentang banjir di Sumatera lebih banyak dibangun melalui penjelasan alamiah dan moral, sementara dimensi struktural dan kebijakan muncul secara terbatas dan tidak konsisten.



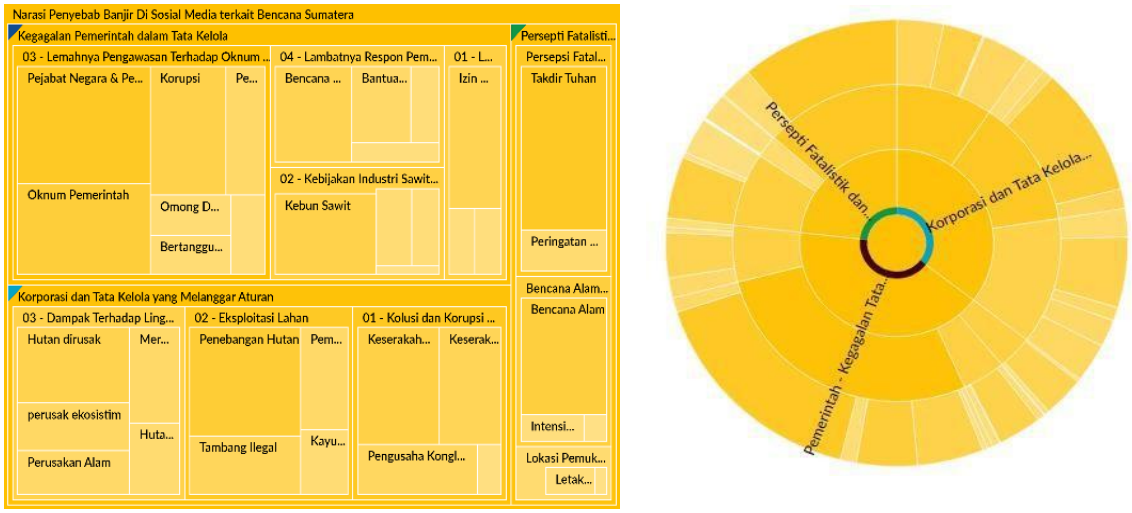
Gambar 1. Word Cloud Diskursus Publik Penyebab Banjir di Sumatera
Sumber : Data Penelitian, 2025

Visualisasi word cloud pada Gambar 1, memperlihatkan struktur awal diskursus publik mengenai penyebab banjir di Sumatera di media sosial. Kata-kata yang paling menonjol didominasi oleh istilah ekologis seperti hutan, alam, air, hujan, dan banjir, yang menunjukkan bahwa warganet secara umum memaknai banjir sebagai peristiwa yang

 E-ISSN 2774-8863

berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dan proses alamiah. Selain itu, kemunculan istilah yang berkaitan dengan aktivitas ekstraktif, seperti kayu, penebangan, sawit, dan tambang, mengindikasikan adanya kesadaran publik terhadap perubahan penggunaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam sebagai bagian dari narasi penyebab bencana. Pada saat yang sama, istilah institusional seperti pemerintah, pejabat, dan negara juga muncul, meskipun dengan tingkat kemenonjolan yang lebih rendah, menandakan bahwa negara hadir dalam diskursus tetapi belum menjadi fokus utama pembingkaian.

Word cloud juga menunjukkan kuatnya dimensi religius dalam diskursus publik, yang tercermin dari menonjolnya kata Allah. Kehadiran istilah ini menandakan bahwa sebagian warganet memaknai banjir sebagai peristiwa moral atau transenden, yang berkaitan dengan teguran atau kehendak Tuhan. Pola ini memperlihatkan bahwa pemaknaan bencana tidak hanya bersifat rasional-teknis, tetapi juga simbolik dan normatif. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat religius, bencana kerap ditafsirkan melalui lensa moral dan spiritual, terutama pada fase awal krisis ketika ketidakpastian dan emosi publik masih tinggi (Hawing, 2021; Husaini, 2024).



Gambar 2. Hierarchy Chart Narasi dan Relasi Tema Penyebab Banjir Sumatera
Sumber : Data Penelitian, 2025

Untuk memahami relasi antarnarasai secara lebih mendalam, analisis dilanjutkan dengan pemetaan hierarkis menggunakan sunburst chart pada Gambar 2. Visualisasi ini menunjukkan bahwa narasi alam dan persepsi fatalistik berfungsi sebagai lapisan terluar dan pintu masuk utama diskursus publik. Namun, pada lapisan berikutnya, narasi tersebut bercabang ke kritik terhadap tata kelola pemerintah dan praktik korporasi, seperti

lemahnya pengawasan, kolusi perizinan, serta eksploitasi hutan dan lahan. Struktur hierarkis ini mengindikasikan bahwa meskipun banjir sering dipahami sebagai peristiwa alamiah, sebagian warganet tetap mengaitkannya dengan keputusan manusia dan struktur kekuasaan, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam.

Dalam pembacaan framing, setidaknya terdapat tiga pola utama. Pertama, framing religius atau fatalistik memposisikan banjir sebagai kehendak di luar kendali manusia, sehingga menekankan penerimaan, kesabaran, dan refleksi moral. Framing ini cenderung mengaburkan dimensi pencegahan dan akuntabilitas institusional, sebagaimana terlihat dalam narasi yang menyebut banjir sebagai "teguran Tuhan" atau "takdir alam". Kedua, framing naturalisasi bencana menempatkan hujan, longsor, dan kondisi geografis sebagai penyebab utama, sehingga banjir dipahami sebagai kejadian yang wajar dan berulang. Pola ini selaras dengan temuan Priyanti et al. (2019) yang menunjukkan bahwa masyarakat sering memandang banjir sebagai bagian dari siklus alam, bukan sebagai risiko yang diproduksi secara sosial. Ketiga, framing kegagalan tata kelola dan aktivitas korporasi menghadirkan negara dan pelaku ekonomi sebagai aktor yang berkontribusi terhadap risiko bencana melalui perizinan, deforestasi, dan pertambangan. Meskipun tidak dominan, framing ini menunjukkan adanya upaya publik untuk menuntut akuntabilitas dan mengaitkan bencana dengan kebijakan serta kepentingan ekonomi tertentu.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa diskursus publik tentang banjir di Sumatera merupakan konstruksi sosial yang dibentuk melalui interaksi antara faktor alam, praktik ekonomi, dan tata kelola negara. Temuan ini memperkuat kerangka social production of disaster risk yang memandang bencana sebagai hasil dari proses sosial-politik yang membentuk kerentanan, bukan semata-mata akibat hazard alamiah (Tierney, 2019). Selain itu, keberadaan berbagai framing yang saling berdampingan mencerminkan dinamika blame attribution, di mana tanggung jawab atas bencana tidak dilekatkan secara tunggal, tetapi tersebar antara alam, Tuhan, korporasi, dan negara. Dalam konteks risk governance, relasi antarnode dalam sunburst chart menunjukkan bahwa risiko banjir dipahami sebagai persoalan sistemik yang melibatkan koordinasi kelembagaan, regulasi, dan pengawasan lintas aktor, sebagaimana juga ditemukan dalam studi komunikasi krisis berbasis media sosial sebelumnya (Palen & Anderson, 2016; Eriksson & Olsson, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa diskursus publik mengenai banjir di Sumatera di media sosial dibangun melalui beragam bingkai penjelasan yang saling berdampingan, dengan dominasi narasi alamiah dan religius. Banjir lebih sering dipahami sebagai peristiwa yang berkaitan dengan hujan, kondisi lingkungan, serta kehendak transenden, sehingga tanggung jawab cenderung tersebar secara simbolik dan tidak terpusat pada aktor tertentu. Pola ini memperlihatkan bagaimana media sosial berfungsi sebagai ruang produksi makna yang tidak hanya merefleksikan fakta empiris, tetapi juga nilai, emosi, dan keyakinan kolektif masyarakat dalam merespons bencana.

Di balik dominasi framing alamiah, penelitian ini juga menemukan keberadaan narasi yang mengaitkan banjir dengan praktik korporasi dan kegagalan tata kelola pemerintah, meskipun tidak selalu menjadi arus utama diskursus. Kritik terhadap deforestasi, pertambangan, dan perizinan menunjukkan bahwa sebagian warga digital memandang banjir sebagai risiko yang diproduksi secara sosial melalui keputusan manusia dan struktur kekuasaan. Temuan ini menegaskan bahwa bencana tidak sepenuhnya dipahami sebagai fenomena alamiah, melainkan juga sebagai konsekuensi dari relasi antara negara, korporasi, dan pengelolaan lingkungan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada kajian kebencanaan dengan memperlihatkan bagaimana risiko bencana diproduksi dan dinegosiasikan secara diskursif di ruang digital. Integrasi pendekatan netnografi dan framing memungkinkan pembacaan bencana sebagai proses sosial yang terbentuk melalui interaksi simbolik antarwarganet lintas platform. Dengan demikian, studi ini melengkapi dominasi pendekatan teknis kebencanaan dengan perspektif sosial-holistik yang menempatkan media sosial sebagai arena penting dalam pembentukan persepsi risiko, atribusi tanggung jawab, dan legitimasi kebijakan.

Dari sisi praktis, temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya strategi komunikasi risiko yang tidak hanya menekankan aspek teknis dan respons darurat, tetapi juga mampu menantang framing fatalistik yang mengaburkan tanggung jawab struktural. Pemerintah dan lembaga kebencanaan perlu memanfaatkan media sosial sebagai ruang dialog reflektif untuk membangun kesadaran bahwa sebagian risiko banjir dapat dicegah melalui tata kelola lingkungan yang lebih akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Arwansyah, O., Wiflihani, W., Suroso, P., Sigalingging, H., & Bangun, D. (2025). Politik dalam bingkai media: Studi mediatization of politics terhadap konten sosial media Dedi Mulyadi. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences*, 8(1), 190-197.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). *Survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia 2025*. APJII.

Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.

Bucher, T., & Helmond, A. (2018). The affordances of social media platforms. *The SAGE Handbook of Social Media*, 233-253.

Douglas, M. (2021). *Risk and blame: Essays in cultural theory*. Routledge.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58.

Eriksson, M., & Olsson, E.-K. (2021). Managing crises in a digital age: Public communication, sensemaking, and trust. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 29(2), 110-118.

Franzke, A. S., Bechmann, A., Zimmer, M., Ess, C., & the Association of Internet Researchers. (2020). Internet research: Ethical guidelines 3.0. *Association of Internet Researchers*.

Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Harvard University Press.

Hawing, H. (2021). Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Makassar. *Journal of Governance and Local Politics*, 3(1), 63-74.

Husaini, S. A. (2024). *Memori kolektif masyarakat terhadap bencana Situ Gintung tahun 2009*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Khankeh, H. R., et al. (2023). Crisis communication and public trust in disaster management. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 88, 103602.

Kligler-Vilenchik, N., et al. (2020). Experiencing media publics. *New Media & Society*, 22(6), 951-969.

Kozinets, R. V. (2016). Netnography. *The International Encyclopedia of Anthropology*, 1-2.

Kozinets, R. V. (2020). *Netnography: The essential guide to qualitative social media research* (3rd ed.). SAGE Publications.

Li, Z. (2014). Social media-mediated crisis communication. *Journal of Public Relations Research*, 26(4), 386-398.

Lukman, A. (2020). Disonansi memori monumen kolonial: Studi kasus Tugu Cornelis Chastelein, Depok, Jawa Barat. *Amerta: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi*, 38(1), 27-36.

Palen, L., & Anderson, K. M. (2016). Crisis informatics—New data for extraordinary times. *Science*, 353(6296), 224-225.

Palen, L., Vieweg, S., & Anderson, K. M. (2020). Supporting disaster response through social media data. *Computer Supported Cooperative Work*, 29(1), 1-32.

Priyanti, R., Hidayah, N., Rosmaharani, S., Nahariani, P., Asri, A., Mukarromah, N., & Mundakir, M. (2019). Community preparedness in flood disaster: A qualitative study. *International Quarterly of Community Health Education*, 40(1), 67-68.

Putra, F. D. (2023). Chronopoetics and memory: How media constructs human temporal experience. *Cantrik: Journal of Cultural Studies*, 5(2), 131-145.

Srivastav, S., & Rai, S. (2022). Netnography in social networking sites: An exploration of cybercultures in consumer groups. *International Journal of Media and Information Literacy*, 7(2), 572-580.

Tierney, K. (2019). *Disasters: A sociological approach*. Polity Press.

Wallace, R., Costello, L., & Devine, A. (2018). Netnographic slog. *International Journal of Qualitative Methods*, 17(1), 1-12.

Yanti, M., & Yusnaini, Y. (2018). The narration of digital literacy movement in Indonesia. *Informasi*, 48(2), 243-255.